

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Immanuel Yohdea Setiawan Kana Hau
NPP. 31.0783
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email :
Pembimbing Skripsi : Prof. Djohermansyah Djohan, MA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Garbage remains a significant issue in many regions, particularly in areas with high population density. Ineffective waste management can lead to serious problems, including disease, disasters, and unpleasant odors that disrupt the comfort of an area. Effective waste management and utilization are essential to mitigate these problems. **Objective:** This research aims to investigate the implementation of waste management in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. **Method:** The study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach, utilizing Edward III's Implementation theory. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The research reveals that the waste management policies implemented by the Kupang City Environment and Hygiene Service have been relatively effective. However, there is still a lack of awareness among the community regarding waste management. **Conclusion:** The Environment and Hygiene Service needs to intensify community outreach to encourage active participation in waste management and utilization, aiming to create a cleaner and more comfortable Kupang City.

Keywords: Implementation, Garbage, Management, Utilization

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang ditemui di setiap daerah, terutama di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sampah bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan baik, menyebabkan penyakit, bencana, dan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan wilayah. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini sebelum pembuangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, menggunakan teori Implementasi Kebijakan (Edward III). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah berjalan cukup baik, namun kesadaran masyarakat masih kurang. **Kesimpulan:** Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu ditingkatkan dalam menggiatkan sosialisasi kepada

masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam membantu mengelola dan memanfaatkan sampah, demi terciptanya Kota Kupang yang bersih dan nyaman.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sampah, Pengelolaan, Pemanfaatan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah kehidupan urban yang dinamis, masalah pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama yang membutuhkan perhatian serius. Pertumbuhan populasi yang cepat dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menghasilkan gelombang sampah yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan kesadaran akan dampak buruknya sampah terhadap ekosistem, kebijakan penanganan sampah menjadi kunci untuk membentuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan dan sudah tidak bermanfaat sedangkan jika ditinjau dari sosial ekonomi sudah tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian (Hadiwiyoto, 1983).

Pengelolaan sampah berfungsi sebagai pintu gerbang penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengingat sifatnya yang beragam berdampak pada berbagai aspek masyarakat dan ekonomi. Namun demikian, itu juga dapat dilihat sebagai hambatan dalam sistem. Seperti yang dinyatakan oleh Sahil dkk (2016:486), "Beberapa faktor yang mempengaruhinya termasuk penyebaran dan kepadatan populasi, karakteristik sosial ekonomi dan lingkungan, serta sikap, perilaku, dan norma budaya yang berlaku dalam masyarakat." Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya (Arikunta, 2018)

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menggambarkan kerangka organisasi pengelolaan sampah di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang memandu pelaksanaannya. Menjunjung tinggi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan mengamatkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga bumi, memastikan kesejahteraan semua individu, dan memelihara lingkungan hidup yang sehat.

Sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, badan administrasi pemerintah dan daerah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Tugas yang diamanatkan meliputi:

- a. Menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan

- e. prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani masalah sampah; dan
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Meskipun Pemerintah Kota Kupang telah melakukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta adanya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran krusial mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan masih menjadi tantangan serius. Peningkatan kesadaran masyarakat perlu menjadi fokus utama untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang telah dijalankan di Kota Kupang.

Kota Kupang telah menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kurangnya keterlibatan dari masyarakat dan badan usaha dalam praktik pengelolaan sampah mengakibatkan pembuangan sampah yang berantakan. Misalnya, di Kelurahan Liliba, metode tradisional pengelolaan sampah masih digunakan, yang melibatkan pengumpulan, pengangkutan, dan pembakaran sampah. Pendekatan ini menganggap sampah hanya sebagai bahan yang tidak berguna tanpa nilai ekonomi apa pun (Irmawan dkk, 2019).

Pengelolaan sampah yang efektif oleh pihak berwenang sangat penting karena tantangan sampah yang sedang berlangsung yang menuntut intervensi pemerintah. Peraturan Walikota Kupang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang oleh pihak berwenang. Selain itu, kesadaran publik yang tidak memadai mengenai konsekuensi pembuangan sampah yang tidak tepat, ditambah dengan penjangkauan masyarakat yang tidak memadai pada proses pengelolaan sampah, menimbulkan potensi ancaman bagi masyarakat. Seiring bertambahnya tanggung jawab, pemerintah daerah harus membangun kerangka kerja tata kelola yang sesuai yang selaras dengan tanggung jawab dan kapasitas daerah.

Berdasarkan konflik yang terjadi dimana kota kupang mendapatkan predikat terkotor dengan kategori sedang di Indonesia pada tahun 2022 oleh KLHK (kompasiana.com) dimana faktor utama yakni sampah, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah serta melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kota Kupang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menangani masalah

sampah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah. Hal ini terlihat dari masih maraknya praktik pembuangan sampah sembarangan dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah yang telah dirancang. Kesenjangan antara kebijakan yang ada dan perilaku masyarakat ini menciptakan hambatan signifikan dalam mencapai lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain kesadaran masyarakat yang rendah, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga masih terbatas. Padahal, sektor swasta memiliki potensi besar dalam membantu mengatasi masalah sampah melalui inovasi teknologi dan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tanpa keterlibatan yang kuat dari semua pihak, kebijakan yang baik pun akan sulit diimplementasikan secara maksimal.

Ketersediaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang juga masih jauh dari optimal. Banyak daerah di Kota Kupang yang masih menggunakan metode pengelolaan sampah yang konvensional dan tidak efisien, seperti pembakaran sampah di tempat terbuka yang dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan penerapan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti teknologi daur ulang dan pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan. Adopsi teknologi ini tidak hanya akan membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga dapat mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis.

Selanjutnya, kesenjangan dalam koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah menjadi masalah yang krusial. Meskipun berbagai peraturan telah dikeluarkan, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Hal ini menyebabkan tumpang tindih tugas dan ketidakefisienan dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tanpa koordinasi yang baik, upaya pengelolaan sampah di Kota Kupang akan terus menghadapi hambatan yang signifikan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk membandingkan serta mengaitkan beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya serta dianggap memiliki keterkaitan yang sama dengan topik dari permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai pokok dalam penulisan skripsi.

Penelitian Pertama, merupakan penelitian yang dilakukan Universitas Muhamadiyah Bengkulu dan ditulis oleh Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, dan Titi Darmi pada tahun 2021. Penelitian tersebut berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan" (Hastuti dkk, 2021). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer (wawancara dan observasi) dan mengumpulkan data sekunder (studi literatur dan

dokumentasi). Peneliti dalam menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data primer menggunakan teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik penelitian yang menentukan subjek penelitian berdasarkan pada kriteria yang ditentukan secara sengaja dengan memperhatikan pertimbangan tertentu, misalnya saja menentukan subjek penelitian dengan memperhatikan peran yang dimiliki individu dalam suatu struktur sosial masyarakat (Faisal, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, selama pelaksanaannya, realisasi penuh konten kebijakan belum tercapai. Beberapa perbedaan telah diidentifikasi dari hasil implementasi program karena berbagai kendala yang dihadapi dalam proses. Kendala tersebut antara lain pendanaan yang tidak mencukupi untuk sosialisasi, kekurangan tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, fasilitas TPS yang tidak memadai, TPS 3R, dan kekurangan armada pengangkut sampah. Selain itu, ada kelangkaan dana operasional yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Selain itu, beberapa pejabat ditemukan melakukan operasi di luar peraturan yang ditetapkan, sementara yang lain tidak mematuhi pedoman SOP yang ditetapkan.

Penelitian selanjutnya, yang ditulis oleh Laurensius P. Sayrani dan Lenny M. Tamunu pada tahun 2020, dilakukan di Universitas Nusa Cendana. Penelitian yang berjudul “Kewarganegaraan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Masalah Sampah di Kota Kupang” (Sayrani & Tamunu, 2020), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Metodologi melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan lapangan, pemrosesan data selanjutnya dengan mengkategorikan dan memeriksa ulang data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah menjadi perhatian mendesak bagi warga Kota Kupang, berdampak baik pada bidang sosial dan ekonomi dari kegiatan mereka. Pengelolaan sampah, dalam hal kuantitas dan organisasi, dianggap sebagai masalah kritis yang terkait dengan perilaku sosial dan ekonomi warga. Pembangkitan sampah di ruang publik, terutama pasar dan daerah perumahan, mencerminkan perilaku publik dan menyoroti kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pengaturan publik. Situasi ini diperparah oleh inisiatif pemerintah yang tidak memadai dalam mengatasi tantangan terkait sampah, terutama menggunakan langkah-langkah reaktif daripada kebijakan pengelolaan sampah proaktif.

Sebaliknya, ada paradoks dalam pengelolaan sampah, terutama dalam penanganan sampah secara efektif di lokasi akses terbatas seperti bangunan pemerintah dan perusahaan komersial. Dilema sampah di Kota Kupang mengandung risiko membanjiri sistem pemerintahan, yang berasal dari rasa kewajiban warga yang tidak memadai terhadap masalah sampah.

Penelitian ketiga, yang ditulis oleh Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, dan Dewi Rostyaningsih, dilakukan di Universitas Diponegoro. Berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Keputusan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah” (Yulistia dkk., 2015), penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menyelidiki kebijakan pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang masih terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, terutama di beberapa wilayah. Peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya dan keterbatasan pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang hanya mampu menangani sebagian kecil dari total produksi harian (800 ton) menjadi tantangan utama. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki sistem pengangkutan agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menggunakan prosedur atau tata cara dimana pemecahan suatu masalah dilakukan melalui pencitraan atau membuat sebuah gambaran yang mendeskripsikan keadaan subjek atau objek dari penelitian (Nawawi, 2012).

Dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan personil kunci termasuk Kepala Departemen, Kepala Seksi Penanganan Sampah, anggota staf, dan anggota masyarakat. Kerangka analisis yang diadopsi oleh peneliti adalah Teori Efektivitas Duncan, yang terdiri dari tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang telah meneliti pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia, penelitian ini unik karena mengkombinasikan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, dan LSM. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala dan peluang yang ada, tetapi juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di konteks lokal Kota Kupang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyajikan model implementasi kebijakan yang adaptif dan berbasis komunitas yang dapat diadopsi oleh daerah lain dengan kondisi serupa. Kinerja dalam implementasi kebijakan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan instansi pelaksananya. Karakteristik instansi pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, etika politik, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi terhadap pelaksanaan kebijakan. (Djohan Djohermansyah, 2022)

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pendekatan kolaboratif yang menekankan pada pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah. Melalui studi kasus di Kota Kupang, penelitian ini mengungkap bagaimana interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan sampah. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang peran teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien dan transparan, melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital. Dengan menyoroti inovasi-inovasi ini, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskusi akademis mengenai pengelolaan sampah tetapi juga menyediakan

rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di kota-kota berkembang.

1.5 Tujuan

Dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka kami mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung penanganan sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan agar menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dikemukakan oleh berbagai orang-orang sebagai narasumber serta perilaku yang dapat diamati. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas maka tujuan dari penelitian ini berfokus kepada mengetahui, menggambarkan, serta menjelaskan mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam Penelitian ini, digunakan teknik analisis data berdasarkan konsep (Miles, 2018) yang menggambarkan 3 langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian kualitatif menjadikan pernyataan dan tindakan sebagaimana hasil dari pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara terhadap informan dan peristiwa sebagai data primer yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini berupaya agar menemukan gambaran serta informasi yang akurat serta relevan dengan penanganan predikat kota terkotor demi kepentingan bersama. Maka dalam penyelesaian permasalahan ini subjek penelitian yang diambil oleh peneliti ialah orang-orang yang terlibat secara langsung serta memahami mengenai masalah penanganan sampah di Kota Kupang. Oleh karena itu subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah unsur pemerintah maupun masyarakat yang memahami permasalahan sampah di Kota Kupang. Adapun informan yang dibutuhkan antara lain :

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang
2. Sekretaris Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
4. Kepala Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
5. Kepala Seksi Pengangkutan Sampah
6. Petugas Lapangan atau Operator

Informan ini dipilih karena dianggap dapat mewakili serta memahami bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah hasil analisa dari penulis yang didapat di lokasi penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui metode yang digunakan. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka Pemerintah Kota Kupang juga menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Tumah Tangga dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai dasar penanganan sampah di Kota Kupang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang berperan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah harus mampu dalam merespon serta menangani persoalan yang ada dengan metode strategis dalam mencapai Kota Kupang yang bersih dan tentram. Upaya dalam penanganan sampah di Kota Kupang saat ini menggunakan TPS3R dan *open dumping*.

3.1 Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menurut Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2018:232), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Smith (1973) dalam (Islamy, 2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari prespektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam Masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah merupakan upaya Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Kota Kupang. Penanganan sampah merupakan aspek pengelolaan lingkungan yang membutuhkan partisipasi dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk aktif dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang memuat beberapa variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting sebagai variabel penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang perlu memahami dengan baik apa yang harus mereka persiapkan dalam membuat kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang. Sejauh ini, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai OPD yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah berjalan kurang maksimal.

2. Sumber Daya

Sumberdaya ialah faktor yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Adapun sumber daya tersebut meliputi: Sumberdaya manusia, Sumberdaya anggaran, Sumber daya peralatan,

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Kemauan dalam melaksanakan sebuah kebijakan menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

4. **Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan terjadi tidak efektif karena adanya ketidakefisienan dalam struktur birokrasi. Aspek-aspek struktur birokrasi mencakup struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Struktur birokrasi umumnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, struktur birokrasi yang melekat bergantung pada Peraturan Walikota Kupang 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

3.2 **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

1. **Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan. Masyarakat merupakan komponen penting karena pihak yang bersentuhan langsung dengan lingkungan ialah masyarakat, masyarakat ada dalam lingkungan itu sendiri. Hal ini menjadi penting dalam menentukan suksesnya suatu kebijakan.

2. **Minimnya Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dengan Masyarakat**

Komunikasi yang bersifat koordinasi atau disebut komunikasi koordinatif bersifat memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berhubungan. Komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang cenderung kurang berjalan efektif dan perlu untuk ditingkatkan kembali.

3. **Kurangnya Anggaran Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Kupang**

Anggaran menjadi penting bagi suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan/kebijakan. Dengan anggaran yang cukup maka baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Peralatan akan memadai untuk bisa menunjang suatu implementasi kegiatan. Terlampir dalam Tabel 4.4, bahwa anggaran untuk Bidang Pengelolaan Sampah memang turun dari tahun ke tahun.

3.3 **Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang**

1. **Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah menjadi penting dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang. Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Kupang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Minimnya Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang Dengan Masyarakat

Komunikasi koordinatif memang penting adanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang untuk melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat.

3. Kurangnya Anggaran Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Kupang

Anggaran pengelolaan sampah yang menurun menghambat implementasi kebijakan penanganan sampah. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang senantiasa berupaya dalam upaya meningkatkan anggaran untuk pengelolaan sampah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang mengalami beberapa hambatan yang signifikan, mirip dengan temuan dalam studi sebelumnya di berbagai daerah. Misalnya, penelitian oleh Hastuti et al. (2021) di Kabupaten Bengkulu Selatan mengidentifikasi kendala seperti pendanaan yang tidak memadai, kekurangan tenaga ahli, dan fasilitas TPS yang tidak memadai, yang semuanya juga ditemukan dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat di Kota Kupang adalah penghambat utama yang kurang terdeteksi dalam studi sebelumnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan penanganan sampah.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pendekatan kolaboratif sebagai solusi potensial, yang memperkaya temuan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sayrani dan Tamunu (2020) di Kota Kupang. Penelitian mereka menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang juga diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai faktor kritis. Namun, penelitian ini menambah dimensi baru dengan menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien dan transparan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi temuan dari penelitian terdahulu tetapi juga memberikan wawasan baru tentang strategi implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan, partisipasi aktif masyarakat masih minim. Hal ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, yang menyebabkan kebijakan dan program penanganan sampah tidak berjalan optimal. Penulis juga menemukan bahwa sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli, menjadi kendala signifikan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta

perbaikan koordinasi dan alokasi sumber daya, sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan penanganan sampah di Kota Kupang.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, penulis mengambil kesimpulan :

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum berjalan dengan baik. Dari 4 Dimensi yang diungkapkan oleh Edward III (1980) yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi hanya Struktur Birokrasi yang bisa terlaksana dengan baik. Struktur Birokrasi sendiri berdiri berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah menjalankan struktur birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun untuk 3 dimensi lainnya mengalami banyak permasalahan.
2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat;
 - b. Kurangnya Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dengan Masyarakat;
 - c. Kurangnya Anggaran Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Kupang.
3. Upaya Menangani Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan adanya program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 - b. Meningkatkan koordinasi secara turun menurun dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sampai kepada *stakeholder* dan masyarakat;

Menangani permasalahan kurangnya anggaran dengan proposal permintaan bantuan dari pemerintah pusat untuk penunjang pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif dan mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk semua konteks penanganan sampah di daerah lain. Kedua, data yang diperoleh terutama berasal dari wawancara dan observasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sehingga mungkin tidak mencerminkan dinamika jangka panjang dari implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang. Selain itu, keterbatasan dalam jumlah dan keragaman responden juga dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman analisis. Penelitian ini juga tidak sepenuhnya mengeksplorasi pengaruh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional atau kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di tingkat lokal.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Untuk mengembangkan penelitian ini di masa depan, penting untuk memperluas cakupan metodologi dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan secara lebih sistematis dan mendalam. Selain itu, penelitian dapat melibatkan lebih banyak stakeholder seperti komunitas lokal, industri, dan akademisi untuk memperluas perspektif dalam memahami tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah. Studi lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan faktor eksternal yang berdampak, seperti perubahan regulasi nasional atau kondisi ekonomi, serta melakukan pemantauan jangka panjang untuk mengevaluasi keberlanjutan dari upaya penanganan sampah yang diimplementasikan di Kota Kupang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang telah memberikan data terkait variabel penelitian bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. (2018). Kebijakan Publik. CV. PUSTAKA SETIA.
- Arikunta. (2018). Pengelolaan Kelas dan Siswa. CV Rajawali.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Gawang Febi. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14937>
- Hadiwoyoto, S. (1983). Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Yayasan Idayu.
- Hardiana, D. (2018). Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Pantai Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Brat. *Jurnal Buana*, 2(2), 495. <https://doi.org/10.24036/student.v2i2.98>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., Darmi, T., Studi, P., & Publik, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Irmawan, H., Djani, W., Salim, A., & Djaha, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>
- Iskandar. (2018). Pentingnya Memelihara Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Secara Partisipatif Demi Meningkatkan Gotong Royong dan Kualitas Hidup Warga. *Jurnal Ilmiah Pena*, 1.
- Islamy Irfan. (2001). Prinsi-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara.
- Lestari, N. P. ., Djohan, D. ., & Nurdin, I. . (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4640–4665. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9006>
- Miles, M. B. , H. A. M. and Saldana. J. (2018). *Qualitative Data Analysis (Fourth Edi)*. SAGE Publication.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Lembaga Penerbit Gajahmada University Press.

- Sayrani, L., & Tamunu, L. (2020). Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik : Studi Isu Sampah di Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*, 2(1), 1 - 13. <https://doi.org/10.35508/tjph.v2i1.2191>
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Keputusan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(3). <https://doi.10.14710/jppmr.v4i3.8774>

